



Mitigasi Dampak Konflik di Selat Hormuz Terhadap Industri Strategis Nasional

Evita Manthovani¹, Frendy Ahmad Afandi²

¹Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian

²Analisis Kebijakan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Kemenko Bidang Perekonomian

Ditujukan kepada:

1. Kemenko Bidang Perekonomian
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian ESDM

Ringkasan Eksekutif

Eskalasi konflik Iran-AS-Israel yang berpotensi memblokir Selat Hormuz menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi Indonesia karena ketergantungan tinggi pasokan energi dan bahan baku petrokimia dari kawasan Teluk Persia. Hal ini berisiko memicu kenaikan harga BBM, pupuk, plastik, FMCG, inflasi pangan, serta penurunan daya beli masyarakat. Masalah utama terletak pada belum adanya sistem ketahanan pasokan industri strategis nasional, sehingga gangguan pasokan tidak hanya meningkatkan harga tetapi juga mengancam keberlangsungan produksi yang dapat berujung pada kontraksi manufaktur, PHK massal, pelemahan konsumsi rumah tangga, tekanan fiskal, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Alternatif solusinya ada 4, yaitu 1) Sistem Peringatan Dini Guncangan Pasokan Nasional dan Cadangan Strategis Wajib, 2) diversifikasi pemasok ke India, China, Rusia, Australia, AS, Afrika, dan ASEAN, 3) peningkatan produksi domestik melalui percepatan *refinery* serta petrokimia dasar, serta 4) perlindungan daya beli masyarakat dan sektor pariwisata melalui instrumen fiskal tertarget. Rekomendasi utama adalah segera membentuk Satgas lintas kementerian dan dunia usaha untuk memetakan stok penyangga industri prioritas, menetapkan daftar bahan baku kritis nasional, menjalankan diversifikasi pemasok global, serta membangun *dashboard* nasional stok strategis secara *real-time* guna menjaga keberlangsungan industri dan mencegah dampak makroekonomi yang lebih luas.

Pendahuluan

Selat Hormuz merupakan chokepoint utama perdagangan energi dunia yang menghubungkan produsen minyak dan gas utama di kawasan Teluk Persia dengan pasar global. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Irak, dan Bahrain menjadi pemasok penting crude oil, LPG, LNG, serta feedstock petrokimia bagi industri Indonesia (Kemen ESDM, 2025). Jika terjadi blokade akibat eskalasi perang Iran-AS-Israel, dampaknya akan sangat cepat dirasakan Indonesia melalui kenaikan harga energi, terganggunya pasokan bahan baku industri, peningkatan biaya logistik, dan imported inflation (World Bank, 2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, "Sekitar 20-25% impor minyak mentah Indonesia melewati Selat Hormuz. Kami sudah mempersiapkan diversifikasi ke Amerika Serikat dan negara lainnya, tetapi gangguan di jalur ini tetap akan berdampak pada harga energi domestik" (Kompas, 2026). Senada dengan itu, pakar ekonomi energi dari Universitas Indonesia, Dr. Akhmad Fathoni, dalam wawancara menyebutkan: "Shock pasokan dari Timur Tengah tidak hanya akan mendorong kenaikan harga BBM dan LPG, tetapi juga memicu efek domino pada biaya produksi petrokimia dan pupuk, yang pada akhirnya mengancam inflasi pangan dan daya beli masyarakat" (CNBC Indonesia, 2026).

Industri yang paling rentan meliputi BBM, petrokimia, pupuk, plastik, FMCG, *hygiene products* seperti pampers dan pembalut, farmasi, logistik nasional, penerbangan, hingga sektor pariwisata. Shock awal dapat muncul dalam 1-2 minggu pada sektor energi dan logistik, kemudian merambat ke industri hilir dalam 30-90 hari (OECD, 2024). Dampak ini dapat meluas dari inflasi menjadi risiko sistemik terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan kebijakan preventif yang tidak hanya menjaga harga, tetapi menjaga keberlangsungan industri nasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Afandi, 2024).

1. MAPPING IMPOR DARI TELUK PERSIA					2. INDUSTRI TERDAMPAK & RISIKO GANGGUAN			
RAW MATERIAL	PENGUNAAN / INDUSTRI	FREKUENSI IMPOR	VOLUME IMPOR (2024)	ASAL UTAMA	INDUSTRI HILIR	PRODUK	RISIKO	PASOKAN BERTAHAN
 Minyak Mentah	BBM, Petrokimia, Listrik, Industri	Harian (Kapal)	1.0 juta bbl/hari (± 36% total impor)	Arab Saudi, Irak, UEA, Kuwait	 Plastik & Kemasan	Botol, Wadah, Kemasan Makanan	Tinggi (Harga Nafta & Petrokimia)	1–2 bulan
 LPG	Rumah Tangga, Industri, Petrokimia	Harian	1,7 juta ton/tahun (± 60%)	Qatar, UEA	 Pupuk	Urea, NPK, ZA	Tinggi (Harga & Pasokan)	1–3 bulan
 Nafta	Petrokimia (Plastik, Serat, Pupuk, Deterjen, dll.)	Mingguan	2,6 juta ton/tahun (± 55%)	Arab Saudi, Qatar	 Pampers & Produk Bayi	Popok, Tisu Basah	Tinggi (Bahan Kimia & SAP)	2–3 bulan
 Petrokimia Dasar (Etilen, Propilen, Aromatik)	Plastik, Karet Sintetis, Kemasan, Tekstil, Otomotif	Bulanan	3,5 juta ton/tahun (± 40%)	Saudi, UEA, Qatar	 Masker & APD	Masker, PPE	Sedang–Tinggi (Bahan Baku Nonwoven)	2–4 bulan
 Pupuk (Amonia, Urea, DAP)	Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan	Bulanan	4,5 juta ton/tahun (± 47%)	Qatar, Arab Saudi, UEA	 BBM & Energi	Pertalite, Solar, Avtur	Tinggi (Pasokan Minyak Mentah)	20–30 hari (tergantung stok)
					 Industri Petrokimia	Serat, Resin, Karet, Solvent	Tinggi (Feedstock Nafta)	1–2 bulan
					 Transportasi & Logistik	Pelayaran, Penerbangan, Trucking	Tinggi (BBM & Asuransi Naik)	Langsung terdampak
					 Pariwisata	Tiket, Hotel, Transportasi	Tinggi (Biaya Operasional)	Langsung terdampak

Sumber: Kementerian ESDM (2025)

Sumber: Kementerian ESDM (2025)

(a)

(b)

Raw Material	Negara Pemasok Lainnya
Minyak Mentah	Nigeria, Angola, Gabon, Aljazair, Brasil, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
LPG	Amerika Serikat (saat ini menjadi pemasok terbesar dengan porsi mencapai 70%), Australia, Bahrain, dan Malaysia.
Nafta	Singapura, Malaysia, dan Rusia.
Petrokimia Dasar	Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
Bahan Baku Pupuk	Mesir, Yordania, Maroko (terutama untuk Fosfor), serta Kanada dan Australia (untuk Kalium).

Sumber: Kemenperin (2025)

(c)

Gambar 1.(a) Mapping impor bahan baku industri dari teluk persia; (b) Potensi industri terdampak dan risiko gangguannya; (c) Negara pemasok lainnya untuk bahan baku industri

Permasalahan

Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku energi dan petrokimia dari kawasan Teluk Persia. Bahan strategis seperti minyak mentah, LPG, LNG, naphtha, ammonia, sulfur, polyethylene (PE), polypropylene (PP), menjadi input utama bagi industri manufaktur nasional. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut:

- Belum adanya Sistem *Early Warning* Nasional untuk Ketahanan Stok Industri.** Saat ini Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini terintegrasi yang mampu memantau secara *real-time* ketahanan stok industri, tingkat ketergantungan impor, ketersediaan stok aman nasional, serta kemampuan penggantian pemasok. Akibatnya, pemerintah dan pelaku industri kesulitan mendeteksi dini potensi gangguan pasokan. Gangguan pasokan pada jalur Selat Hormuz – yang mengangkut sekitar 20-25% impor minyak mentah Indonesia – berpotensi menimbulkan efek berantai (IEA, 2025). Pada tahap awal terjadi kenaikan harga BBM dan biaya logistik, diikuti lonjakan biaya produksi industri petrokimia, kenaikan harga pupuk yang memicu inflasi pangan, serta tekanan pada industri hilir rumah tangga seperti pembalut, pampers, masker, farmasi, dan produk FMCG lainnya.
- Kebijakan Masih Terlalu Berfokus pada Stabilisasi Harga melalui Subsidi Reaktif.** Kebijakan yang ada cenderung reaktif dan berorientasi pada penahanan harga melalui subsidi BBM dan energi yang luas, bukan pada perlindungan keberlangsungan produksi industri. Pendekatan ini kurang efektif menghadapi *shock* geopolitik karena jika industri strategis berhenti beroperasi, dampaknya jauh lebih besar, yaitu PHK massal, kontraksi sektor manufaktur, pelemahan konsumsi rumah tangga, tekanan fiskal yang semakin berat, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Masalah inti yang mendasari adalah ketiadaan sistem ketahanan pasokan industri strategis nasional yang komprehensif dan antisipatif dalam menghadapi berbagai guncangan geopolitik global.

3. DAMPAK EKONOMI MAKRO	SIMULASI KENAikan HARGA JIKA BLOKADE BERLANGSUNG >1 BULAN	4. MAPPING INDUSTRI STRATEGIS TERDAMPAK																																												
• Inflasi meningkat (BBM, pupuk, plastik, logistik, tiket transportasi) • Biaya produksi naik → menekan daya saing & menurunkan margin • Daya beli masyarakat tertekan • Risiko penurunan pertumbuhan ekonomi 0,3 – 0,8% • Potensi PHK di industri padat karya • Defisit neraca perdagangan membesar	BBM : +10 – 20% LPG : +15 – 25% Pupuk : +20 – 30% Plastik (resin) : +15 – 30% Tiket Pesawat : +15 – 50%	INDUSTRI	OMZET / TAHUN (ESTIMASI)	TENAGA KERJA	BERDIRI SEJAK	KETERANGAN	Industri Petrokimia	Rp 550 T	± 200.000	1970-an	Input banyak sektor hilir	Industri Pupuk	Rp 120 T	± 50.000	1960-an	Pangan & perkebunan nasional	Industri Plastik & Kemasan	Rp 300 T	± 300.000	1980-an	FMCG, makanan, farmasi	Industri Kertas & Tisu	Rp 80 T	± 80.000	1970-an	Pampers, tisu, hygiene	Industri Tekstil & Serat	Rp 150 T	± 250.000	1970-an	Serat sintetis impor	Industri Farmasi	Rp 140 T	± 90.000	1980-an	Bahan kimia impor	Transportasi & Logistik	Rp 500 T	± 500.000	1950-an	Sangat sensitif terhadap BBM	Pariwisata	Rp 280 T	± 12 juta (tidak langsung)	–	Tiket & akomodasi naik
INDUSTRI	OMZET / TAHUN (ESTIMASI)	TENAGA KERJA	BERDIRI SEJAK	KETERANGAN																																										
Industri Petrokimia	Rp 550 T	± 200.000	1970-an	Input banyak sektor hilir																																										
Industri Pupuk	Rp 120 T	± 50.000	1960-an	Pangan & perkebunan nasional																																										
Industri Plastik & Kemasan	Rp 300 T	± 300.000	1980-an	FMCG, makanan, farmasi																																										
Industri Kertas & Tisu	Rp 80 T	± 80.000	1970-an	Pampers, tisu, hygiene																																										
Industri Tekstil & Serat	Rp 150 T	± 250.000	1970-an	Serat sintetis impor																																										
Industri Farmasi	Rp 140 T	± 90.000	1980-an	Bahan kimia impor																																										
Transportasi & Logistik	Rp 500 T	± 500.000	1950-an	Sangat sensitif terhadap BBM																																										
Pariwisata	Rp 280 T	± 12 juta (tidak langsung)	–	Tiket & akomodasi naik																																										

Sumber: Kemenperin (2026)

Sumber: Kemenperin (2024)

(a)

(b)

Gambar 2. (a) Dampak ekonomi makro gangguan Selat Hormuz; (b) Mapping industri strategis terdampak

Alternatif Solusi

Untuk mengatasi masalah tersebut terdapat 4 alternatif, opsi 1 sebagai *preferred option*, dan opsi lainnya sebagai *supporting policies* yaitu:

1. Sistem Peringatan Dini Guncangan Pasokan Nasional dan Cadangan Strategis Wajib (*Preferred Option*)

Alternatif ini menjadi pilihan utama karena bersifat preventif dan cepat respons. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memimpin pembentukan sistem peringatan dini nasional yang memantau stok industri strategis, tingkat ketergantungan impor, dan potensi gangguan pasokan secara real-time, didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk integrasi data. Secara paralel, Kemenperin bersama Kementerian BUMN mewajibkan perusahaan industri strategis (baik swasta maupun BUMN) untuk menyediakan cadangan strategis minimal bagi komoditas kritis seperti naphtha, ammonia, sulfur, LPG, dan resin. Pendekatan ini memungkinkan respons kebijakan yang cepat dan berbasis data, sehingga penutupan industri dapat dicegah sejak dini. Tantangan utamanya adalah koordinasi lintas lembaga dan kualitas data industri yang akurat.

2. Diversifikasi Pemasok (*Supporting Policy*)

Kemendag bersama Kemenperin dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bertugas memimpin diversifikasi pemasok melalui pembentukan war room khusus lintas sektor. Tugasnya meliputi negosiasi dagang, pengalihan kontrak impor, dan pengamanan jalur logistik prioritas dari negara alternatif seperti India, China, Rusia, Australia, Amerika Serikat, Afrika, dan ASEAN. Pelaku usaha (asosiasi industri) diwajibkan aktif melaporkan kebutuhan dan menjalankan kontrak baru, sementara Kementerian Perhubungan mendukung pengamanan logistik impor. Kebijakan ini mengurangi risiko blokade Selat Hormuz dan menstabilkan harga melalui sumber pasokan yang lebih beragam. Kelemahannya adalah waktu penyesuaian kualitas dan potensi kenaikan biaya kontrak awal.

3. Mendorong pasokan bahan baku dari domestik & Substitusi Impor (*Supporting Policy*)

Solusi struktural jangka menengah-panjang ini dipimpin oleh Kemenperin bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BKPM. Keduanya bertugas mempercepat pembangunan dan ekspansi *refinery*, industri petrokimia dasar, pabrik methanol, serta pabrik ammonia melalui insentif investasi dan penyederhanaan perizinan. Kementerian Keuangan mendukung melalui skema pembiayaan dan insentif fiskal, sementara pelaku usaha swasta dan BUMN menjadi pelaksana proyek. Pendekatan ini memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, mendukung hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan defisit transaksi berjalan. Tantangannya adalah kebutuhan investasi besar dan waktu pembangunan yang relatif panjang.

4. Perlindungan daya beli dan perlindungan terhadap devisa wisata (*Supporting Policy*)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Sosial memimpin perlindungan daya beli masyarakat melalui instrumen seperti transport voucher, bantuan pangan terbatas, dan dukungan modal kerja UMKM. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Kementerian Perhubungan menyediakan avtur *support* terbatas bagi rute wisata prioritas penghasil devisa. Kebijakan ini menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan penerimaan devisa pariwisata di tengah kenaikan biaya energi dan transportasi.

No	Opsi Kebijakan	Kelebihan	Kelemahan / Risiko	Skor
1	Sistem Peringatan Dini Guncangan Pasokan Nasional dan Cadangan Strategis Wajib	Menjaga keberlangsungan industri, mencegah <i>shutdown</i> , presisi tinggi kesiapan data nasional	Memerlukan koordinasi lintas K/L dan	★★★★★ (5/5)
2	Diversifikasi Pemasok	Mengurangi ketergantungan kawasan Teluk Persia	Membutuhkan negosiasi cepat dan penyesuaian kontrak impor	★★★★☆ (4/5)
3	Mendorong pasokan bahan baku dari domestik & Substitusi Impor	Solusi struktural jangka panjang, memperkuat industri nasional	Investasi besar, implementasi lebih lambat	★★★★☆ (4/5)
4	Perlindungan daya beli dan perlindungan terhadap devisa wisata	Menjaga daya beli dan devisa wisata	Efek terbatas jika pasokan industri tetap terganggu	★★★☆☆ (3/5)

Keterangan skoring dalam tabel tersebut didasarkan pada bobot manfaat berbanding risiko:

- Skor 3/5 (Cukup): diberikan jika kebijakan tersebut hanya bersifat jangka pendek atau memiliki beban fiskal yang besar (seperti subsidi).
- Skor 4/5 (Sangat Baik): untuk kebijakan pendukung (*supporting policy*) yang memiliki solusi struktural jangka panjang namun implementasinya lebih lambat atau membutuhkan negosiasi kontrak.
- Skor 5/5 (Optimal): diberikan jika kebijakan (misal: Sistem Peringatan Dini) memiliki manfaat strategis yang tinggi dengan risiko yang dapat dikelola melalui koordinasi.

Rekomendasi

Implementasi direkomendasikan dalam 3 tahap. **Jangka pendek (0-6 bulan)**, pemerintah disarankan membentuk *Task Force* Nasional lintas kementerian dan dunia usaha, melakukan pemetaan *buffer stock* seluruh industri prioritas, menetapkan daftar bahan baku kritis nasional, serta membangun *dashboard warning system* nasional. Diversifikasi pemasok harus segera dijalankan melalui alih sumber pasokan ke India, China, Rusia, Australia, Amerika Serikat, Afrika, dan negara-negara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada Teluk Persia. Pemerintah juga perlu menyiapkan perlindungan fiskal tertarget berupa subsidi pengiriman barang, dukungan transportasi pupuk, penangguhan sementara PPN, dan relaksasi bea impor bagi sektor prioritas. **Jangka menengah (6-24 bulan)**, cadangan strategis industri diwajibkan secara nasional bagi perusahaan di sektor prioritas. Langkah ini disertai dengan percepatan pembangunan *refinery*, industri petrokimia dasar, pabrik methanol, pabrik ammonia, serta program substitusi impor strategis yang lebih masif. **Jangka panjang (24 bulan ke atas)**, kebijakan difokuskan pada pembangunan fondasi permanen ketahanan ekonomi nasional untuk menghadapi berbagai guncangan geopolitik global. Hal ini mencakup penguatan ekosistem industri hulu-hilir yang terintegrasi, pengembangan teknologi dan riset bahan baku alternatif, serta penguatan diplomasi ekonomi untuk mendukung kemandirian nasional.

Daftar Pustaka

- Afandi, FA. 2024. Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Keterkaitan Kebijakan Ekonomi Makro Antara Fiskal, Moneter, dan Sektor Riil. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2025. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2025. Jakarta: BPS.
- IEA [International Energy Agency]. 2025. Global Energy Market Outlook 2025. Paris: IEA Publishing.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2024. Mapping Industri Strategis Terdampak dan Estimasi Kinerja Sektoral Nasional. Jakarta: Kemenperin RI.